

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Tesis/Disertasi

- Aji, Ari Bakti Windi. Tesis. *Perubahan Konstitusi (Studi tentang Pengaturan Prosedur dan Praktek Perubahan Konstitusi di Indonesia)*, Yogyakarta: UII.
- Amrusyi, Fahmi, 1987, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurahman*, Jakarta: Media Sarana Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Perkembangan Baru tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Buana, Mirza Satria, 2017, *Penataan Ulang dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Menakar Konsep Omnibus Law dan Consolidation Law untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara)*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.
- Budiarjo, Miriam, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Chaidir, Ellydar dan Sudi Fahmi, 2010, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Total Media.
- Fahmal, Muin, 2017, *Penataan Ulang dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Penataan Ulang Jenis dan Hierarki peraturan Perundang-Undangan Indonesia)*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.

- Huda, Ni'matul, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Huda, Ni'matul, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan IV, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- H.R, Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- H.R, Syauckani, Afan Gaffar, dan M. Ryass Rasyid, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrati, Maria Farida, 2002, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Isjwara, Fred, 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Bandung: Bindacipta.
- Jum Anggriani, 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta: Utama.
- Kadir, Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Baksi.
- Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Kusuma, Ananda, 2004, *Lahirnya UUD 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Edisi Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Marbun, S. F., 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, Moh. Mahfud, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.

- MD, Moh. Mahfud, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moenta, Andi Pangareng dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Muslimin, Amrah, 1986, *Aspek-Aspek Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni.
- Ningsi, Sutra, 2010, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Nurbaningsih, Enny, 2019, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Aktualisasi Wewenang Mengatur di Era Otonomi Luas)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyanto, Astim, 2006, *Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung.
- Rodee, Carlton Clymer, dkk., 2008, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosdianasari, dkk, 2009, *Dinamika Penyusunan, Substansi Dan Implementasi Perda Pelayanan Publik*, Bandung: YIPD, ADKASI, dan *Justice For The Poor The World Bank*,
- Sayuna, Inche, Tesis, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Situmorang, Victor, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejito, Irawan, 1983, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Strong, C.F., 2015, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Cetakan Ketiga, Bandung: Penerbit Nusa media.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2017, *Ilmu Perundang-undangan*, Cetakan kedua, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yuliantri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajawali Press.

#### **Jurnal**

- Adiyanta, F. C. Susila, 2018, *Menakar Produk Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Kondusif bagi Investasi di Daerah*, Administrative Law & Governance Journal. Vol. 1 Edisi 3 Agustus.
- Berry, Michael Frans, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan*, Muhammadiyah Law Review 2 (2), Juli-2018.
- Busroh, Firman Freaddy, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.
- Effendi, Syafnil, *Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah*, Jurnal Humanus, Volume X, Nomor 1-2011.
- Hidayat, Arief, *Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Volume 17, Nomor 2, April-2018.
- Mahmuzar, *Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 2. 2019.
- Michael, Tomy, *Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus law*, Jurnal Ius Constituendum 5, No. 1 2020.
- Lambuun, Topane Gayuus, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 3-September-2009.

- Putra, Antoni, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Suntaro, Agus, *Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja*, Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 1, April 2021.
- Simandjuntak, Reynold, *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni-2015.
- Ridwan, Zulkarnain, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus, 2012.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Shadiqin, Moch Thariq, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 137/PUUXIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 Terhadap Mekanisme Pengawasan Perda*, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 1 Edisi 1 March 2020.
- Suhardjana, Johannes, *Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3-2010. Suparto, *Pemisahan Kekuasaan dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam*, Jurnal Selat, Volume. 4 Nomor. 1, Oktober-2016.
- Supriyadi, dan Andi Intan Purnamasari, *Gagasan Penggunaan Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, Juli 2021.
- Waris, Irwan, *Pergeseran Paradigma Sentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret-2012.
- Yuswanto, *Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah

### **Putusan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **Lainnya**

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201024173045-12-562388/poin-poin-kontroversial-omnibus-law> diakses pada 14 April 2022.

Garner, Bryan A (Editor in Chief), *Black Law Dictionary, Eight Edition*, (Thompson West: 2004) 175.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/> diakses pada 25 Desember 2021 – 18 April 2022.

Cintia, Indah., Madinar, Himmah A'la Rufaida, 2018, *Urgensi Sinkronisasi dan Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah*, <https://www.researchgate.net/publication/325473140> diakses pada 17 April 2022.

Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024. Jakarta: Presiden RI, 20 Oktober 2019.

Portal Resmi Pemerintah yang khusus memberikan informasi seputar UU Cipta Kerja: <https://uu-ciptakerja.go.id/> diakses pada 25 Desember 2021 – 18 April 2022.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan di Bawah Undang-Undang: <https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/RPP-Sinkronisasi-Peraturan-Perundang-Undangan-Di-Bawah-UU.pdf> diakses pada 18 April 2022.

